

LAPORAN KINERJA SEMESTER I 2025



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) satuan kerja BBPK Ciloto Semester I Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja BBPK Ciloto Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BBPK Ciloto dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali serta alat pemacu kinerja di BBPK Ciloto. Semester I Tahun Anggaran 2025 menginformasikan capaian kinerja kegiatan dan capaian sasaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam rentang bulan Januari s.d Juni Tahun 2025. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi guna perbaikan dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Selanjutnya kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari kesempurnaan; oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Ciloto, 10 Juli 2025

Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto



Dr. RR Dhian Probhoyekti

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Kesehatan mempunyai tujuan yang salah satunya yaitu terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan dengan sasaran strategis meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM. Pemenuhan sasaran strategis tersebut dapat dicapai melalui sasaran program/sasaran kegiatan BBPK Ciloto yaitu meningkatnya ketersediaan SDM sesuai standar.

BBPK Ciloto sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Laporan Kinerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto Tahun 2024 ini adalah wujud pencapaian keberhasilan BBPK Ciloto dalam memenuhi target kinerja serta sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja BBPK Ciloto dimasa yang akan datang.

Kinerja BBPK Ciloto Tahun 2025 dengan capaian rata-rata kinerja sebesar 89,92% berhasil mewujudkan sasaran kegiatan di tahun 2025. Empat (4) indikator telah memenuhi target dan 5 indikator masih dalam proses pencapaian target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja BBPK Ciloto Tahun 2025 dituangkan pada tabel di bawah ini, dimana secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dimaksud telah sesuai dengan rencana bahkan terdapat capaian yang melampaui dari target yang telah ditetapkan.

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja	% Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan	98%	216,65%	221,07%
		2. Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Sesuai Dengan 9 Penyakit Prioritas	98%	0%	0%
2	Terwujudnya Pemberian Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran	3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	94,77	105,30%
3	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pelatihan SDM Kesehatan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat	85	92,16	108,43%
		5. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	5 Pelatihan	3 Pelatihan	60%
4	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	6. Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	4126 sertifikat	5653 Sertifikat	137,01%
5	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	7. Nilai Kinerja Anggaran	80,1	52,59	65,66%
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%	20,99%	21,86%

Pada awal tahun 2025 untuk melaksanakan seluruh kegiatan tersebut disediakan Pagu Awal sebesar 53.171.873.000,- (*Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang bersumber dari DIPA BBPK Ciloto. Revisi DIPA terakhir pada tanggal 26 Juni 2025 merupakan Revisi ke-4 dengan perubahan pagu menjadi 51.841.749.000,- (*Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan*

Ribu Rupiah) dengan nilai *blokir* sebesar Rp 27.659.210.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Hasil pengukuran realisasi anggaran yang dicapai BBPK Ciloto sampai dengan Semester I Tahun 2025 adalah sebesar Rp 10.883.616.143,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 20,99% dari pagu anggaran atau 45,01% dari pagu efektif.

Permasalahan yang dihadapi BBPK Ciloto untuk mencapai capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan adalah :

1. Adanya blokir anggaran dikarenakan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025
2. Belum tersedianya kurikulum pelatihan dengan metode MOOC terutama untuk pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas.

Langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Melakukan pelatihan dengan metode MOOC untuk pelatihan-pelatihan yang telah tersedia kurikulum MOOC nya
2. Menyusun kurikulum pelatihan MOOC terkait pelatihan sesuai dengan 9 penyakit prioritas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	3
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Organisasi BBPK Ciloto	4
E. Tugas Pokok dan Fungsi	6
F. Sumber Daya	6
G. Sistematika Laporan Kinerja	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
A. Visi	11
B. Misi	11
C. Kebijakan	11
D. Tujuan dan Sasaran Kegiatan	11
E. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
1. Persentase SDM yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	16
2. Persentase SDM yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	19
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	21
4. Indeks Kepuasan Masyarakat	23
5. Pengembangan Model Pembelajaran Jarak Jauh	26
6. Jumlah SDM Kesehatan dan Nonkesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	27
7. Nilai Kinerja Anggaran	29
8. Persentase Realisasi Anggaran	30
B. Capaian Kinerja Lainnya	31
C. Realisasi Anggaran	33

BAB IV PENUTUP 36

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BBPK Ciloto	5
Gambar 3.1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	22
Gambar 3.2	Realisasi Anggaran.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jenis Pegawai BBPK Ciloto Tahun 2025	7
Tabel 1.2	Distribusi Tenaga ASN BBPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ciloto Tahun 2025	7
Tabel 1.3	Distribusi Tenaga PPNPN BBPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ciloto Tahun 2025	8
Tabel 2.1	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan BBPK Ciloto	12
Tabel 2.2	Definisi Operasional	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja BBPK Ciloto Tahun 2025	15
Tabel 3.1	Perbandingan Indikator Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan semester I tahun 2023 – 2025	17
Tabel 3.2	Kegiatan capaian indikator persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan	18
Tabel 3.3	Perbandingan persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas semester I tahun 2023 – 2025	19
Tabel 3.4	Perbandingan indikator kinerja pelaksanaan anggaran semester I tahun 2023 – 2025	22
Tabel 3.5	Perbandingan indeks kepuasan masyarakat semester I tahun 2023 – 2025	24
Tabel 3.6	Perbandingan pengembangan model pembelajaran jarak jauh semester I tahun 2023 – 2025	26
Tabel 3.7	Perbandingan jumlah SDM kesehatan dan nonkesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi semester I tahun 2023 – 2025	27
Tabel 3.8	Perbandingan persentase realisasi anggaran semester I tahun 2023 – 2025	30
Tabel 3.9	Realisasi Pelatihan Kerjasama	32
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja	34
Tabel 3.11	Realisasi PNBK Per Jenis Penerimaan	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Pencapaian visi Indonesia 2045 dilaksanakan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. SDM merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Strategi pembangunan SDM mencakup beberapa bidang, dimana salah satunya adalah bidang kesehatan. Pembangunan SDM bidang kesehatan akan meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk pencapaian target strategi nasional di bidang kesehatan, yaitu kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan penguatan sistem kesehatan melalui transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan menjadi pola Kementerian Kesehatan dalam melakukan reformasi di bidang kesehatan. Transformasi kesehatan diwujudkan dalam bentuk enam pilar transformasi kesehatan yang salah satunya adalah transformasi SDM Kesehatan. Tujuan Utama Transformasi SDM Kesehatan :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan
Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi. Memastikan tenaga kesehatan memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan kesehatan.
2. Menambah Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memadai
Menyesuaikan jumlah tenaga kesehatan dengan kebutuhan layanan di berbagai daerah. Mendorong peningkatan jumlah lulusan tenaga kesehatan melalui akses pendidikan yang lebih luas.
3. Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan
Mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Memberikan insentif dan kebijakan khusus bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah kurang terjangkau.
4. Meningkatkan Kesejahteraan dan Motivasi SDM Kesehatan
Memberikan tunjangan, perlindungan, dan kesejahteraan yang layak bagi tenaga kesehatan. Meningkatkan lingkungan kerja yang mendukung profesionalisme dan keseimbangan kerja-hidup.

5. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Digital dalam SDM Kesehatan

Mengembangkan sistem informasi SDM kesehatan untuk perencanaan dan monitoring tenaga kesehatan. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam penggunaan teknologi digital dan telemedicine.

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal. BBPK Ciloto mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga Kesehatan baik bagi Aparatur Sipil Negara maupun SDM Kesehatan. Selain melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan BBPK Ciloto juga melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga pendukung/penunjang kesehatan berdasarkan usulan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil negara setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Sistem ini merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan bagian tidak terpisahkan dari SAKIP.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan berdasarkan siklus anggaran yang berjalan satu tahun. Dalam pembuatan Laporan Kinerja, suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, dari instansi tertinggi hingga unit kerja, setiap tahun menyampaikan laporan informasi kerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. Laporan Kinerja BBPK Ciloto

Tahun 2025 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pencapaian 5 (lima) sasaran program/kegiatan yang diukur berdasarkan 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan di BBPK Ciloto. Penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dari Direktorat Sumber Daya Manusia Kesehatan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Permasalahan Utama (Isu Strategis) Pelatihan Bidang Kesehatan

Tatanan masyarakat yang mandiri, adil, dan makmur diantaranya terjaminnya ketahanan sistem kesehatan melalui kemampuan dalam pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global yang diwujudkan melalui transformasi kesehatan tentang ketahanan kesehatan. Hal tersebut dalam rangka upaya antisipasi perubahan epidemiologi yang demikian pesat, perlu kesiapan SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi dalam pencegahan, deteksi, dan respon penyakit.

Selain itu perlunya peningkatan kapasitas dan ketahanan sistem kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit perlu juga mempertimbangkan kecepatan pemeriksaan sampel laboratorium dan ketepatan informasi hasil untuk mengetahui pola sebaran penyakit. Untuk itu diperlukan penguatan kapasitas SDM laboratorium kesehatan yang mempunyai kemampuan baik dari segi manajerial dan operasional laboratorium kesehatan masyarakat.

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Ciloto sebagai salah satu unit pelaksana teknis pelatihan kesehatan turut berupaya meningkatkan kapasitas SDM Kesehatan dalam pencegahan, deteksi dan respon penyakit serta kecepatan pemeriksaan sampel laboratorium kesehatan masyarakat.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan kinerja BBPK Ciloto Semester I Tahun 2025 adalah :

1. Sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan BBPK Ciloto selama 1 (satu) semester
2. Sebagai dasar untuk menilai capaian kinerja organisasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan
3. Sebagai dasar untuk mengetahui kendala serta faktor pendukung pelaksanaan program
4. Sebagai dasar untuk masukan dan perbaikan dalam pengambilan Keputusan di masa yang akan datang
5. Sebagai bentuk transparansi publik dalam mengelola sumber data dan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPK Ciloto.

D. Organisasi BBPK Ciloto

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2023 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto dipimpin oleh Kepala, dengan susunan organisasi terdiri atas :

1. Subbagian Administrasi Umum, dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan, Kepala BBPK Ciloto dapat membentuk, mengubah, dan/atau menghapus instalasi setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal SDM Kesehatan. Pembentukan, perubahan, dan/atau penghapusan instalasi mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal SDM.

Uraian tugas dan fungsi dari masing-masing unit di BBPK Ciloto adalah sebagai berikut :

1. Kepala

Kepala BBPK Ciloto dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

2. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Besar Pelatihan Kesehatan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan BBPK Ciloto ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BBPK Ciloto sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. BBPK Ciloto memiliki 24 orang Jabatan Fungsional Widyaiswara serta 12 orang Jabatan Fungsional Tertentu.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja yang ada di BBPK Ciloto adalah sebagai berikut :

- 1) Tim Kerja Pelatihan Teknis Fungsional dan Profesi Kesehatan
- 2) Tim Kerja Pelatihan Manajemen dan Teknis Non Kesehatan
- 3) Tim Kerja Pelatihan Teknis Upaya Kesehatan
- 4) Tim Kerja Pelatihan Teknis Program Kesehatan
- 5) Tim Kerja Penjaminan Mutu Pelatihan
- 6) Tim Kerja Inovasi dan Digitalisasi Pelatihan

4. Instalasi

Instalasi merupakan fasilitas penunjang penyelenggaraan operasional di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan. Instalasi dipimpin oleh seorang pejabat nonstruktural yang bertanggung jawab kepada kepala UPT. Adapun jenis instalasi yang terdapat di BBPK Ciloto adalah sebagai berikut :

- 1) Instalasi Gizi
- 2) Instalasi Asrama
- 3) Instalasi Sarana dan Prasarana
- 4) Instalasi Perpustakaan
- 5) Instalasi Layanan Pelanggan

Gambar 1.1
Struktur Organisasi BBPK Ciloto



E. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dijelaskan pada Pasal 5 bahwa “**UPT Bidang Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga kesehatan**” dan melaksanakan pengelolaan pelatihan tenaga pendukung/ penunjang kesehatan berdasarkan usulan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

2. Fungsi

Berdasarkan tugas tersebut diatas, BBPK Ciloto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
- c. Pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
- d. Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
- e. Pelaksanaan uji kompetensi;
- f. Pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu ;
- g. Pengelolaan data dan sistem informasi pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
- h. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan manajemen, teknis, teknis nonkesehatan, fungsional, dan pelatihan unggulan tertentu;
- i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Pelatihan Kesehatan.

F. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Jenis pegawai BBPK Ciloto terdiri dari unsur PNS dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), secara rinci distribusi tenaga menurut jenis pegawai dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.1

Jenis Pegawai BBPK Ciloto Tahun 2025

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	ASN	81 orang
2	PPNPN	61 orang
	Jumlah	142 orang

Berdasarkan tabel diatas, pegawai BBPK Ciloto pada Semester I Tahun 2025 berjumlah 142 orang terdiri dari ASN 81 orang (79 orang Pegawai Negeri Sipil dan 2 orang PPPK) serta 61 orang Pegawai PPNPN.

Distribusi Tenaga ASN BBPK Ciloto Tahun 2025 berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Distribusi Tenaga ASN BBPK Ciloto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	S3	3	3,70
2	S2	28	34,75
3	S1/ DIV	34	41,98
4	D3	1	1,23
5	SMA/ Paket C atau setara SMA	13	16,05
6	SMP/Paket B atau setara SMP	-	0
7	SD/Paket A atau setara SD	2	2,47
Total		81	100

Berdasarkan tabel di atas, tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) BBPK Ciloto sebagian besar S1 (41,98%), S2 (34,75%), Sementara yang berpendidikan SMA (16,05%).

Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di BBPK Ciloto berjumlah 61 orang diluar pegawai *outsourcing*. Adapun persentase pendidikannya pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Distribusi Tenaga PPNPN BBPK Ciloto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	Persentase
1	S1	15	24,59
2	D3	1	1,64
3	SMA/ Paket C atau setara SMA	38	62,30
4	SMP/ Paket B atau setara SMP	3	4,92
5	SD/ Paket A atau setara SD	4	6,56
Total		61	100

Berdasarkan di atas Tingkat Pendidikan tenaga PPNPN sebagian besar berpendidikan SMA (62,30%), sementara yang berpendidikan S1 (24,59%).

1. Sumber Daya Pembiayaan

Guna mendukung penyelenggaraan kegiatan di BBPK Ciloto maka dibutuhkan pembiayaan yang menjamin kecukupan dalam penyediaannya, akurat dalam pengalokasian, serta efektif dan efisien dalam pembelanjannya. Sumber pembiayaan pada tahun 2024 berdasarkan DIPA awal tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp 53.171.873.000,- (*Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dan Revisi DIPA keempat tanggal 26 Juni 2025 sebesar Rp 51.841.749.000,- (*Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan nilai *blokir* akibat adanya Inpres No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam pelaksanaan APBN dan APBD sebesar Rp 27.659.210.000,- (*Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

G. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan dari Laporan Kinerja (LKj) BBPK Ciloto Tahun 2025 ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan. LKj lingkup Kementerian Kesehatan disusun dengan sistematika :

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan mengenai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja, serta sejauh mana usaha-usaha yang telah dilakukan oleh dalam mencapai tujuan dan sasaran. Beberapa capaian kinerja penting dari indikator kinerja utama yang dapat menggambarkan kinerja serta kinerja anggaran secara keseluruhan.

Selain itu diuraikan juga secara ringkas tentang kendala-kendala yang terjadi selama pelaksanaan dalam kurun waktu 1 tahun, serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan langkah-langkah antisipasi dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi di tahun yang akan datang dan dapat pula menyampaikan prestasi yang telah dicapai.

2. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

3. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menjelaskan tentang rencana strategis yang berisi visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran strategis/ sasaran program/ sasaran kegiatan, dan perjanjian kinerja.

4. Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Capaian kinerja lainnya (jika ada)

Dalam subbab ini dijelaskan capaian-capaian penting satuan kerja

c. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

5. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi

Visi BBPK Ciloto mengikuti visi Kementerian Kesehatan yang merupakan penjabaran dari Visi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Kesehatan yaitu :

“Masyarakat Yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”

B. Misi

Untuk mewujudkan visi Kementerian Kesehatan, ditetapkan misinya yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup
2. Membudayakan gaya hidup sehat
3. Memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas, baik, adil, dan terjangkau
4. Mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsive
5. Memperkuat tata Kelola dan pendanaan kesehatan nasional yang berkecukupan, adil dan berkelanjutan
6. Mengembangkan teknologi kesehatan yang maju
7. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien

C. Kebijakan

Kebijakan BBPK Ciloto sesuai dengan transformasi kesehatan yang merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional. Transformasi kesehatan tersebut meliputi :

1. Transformasi Layanan Primer
2. Transformasi Layanan Rujukan
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan
5. Transformasi SDM Kesehatan, dan
6. Transformasi Teknologi Kesehatan.

D. Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Salah satu program Direktorat Jenderal SDM Kesehatan, yaitu meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM. Pemenuhan program tersebut dapat dicapai oleh BBPK Ciloto melalui sasaran program/ sasaran kegiatan meningkatnya ketersediaan SDM sesuai standar. Sasaran program/ sasaran kegiatan BBPK Ciloto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan BBPK Ciloto

No	Program	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya ketersediaan SDMK sesuai standar	<p>Persentase SDMK yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan</p> <p>Persentase SDMK yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Sesuai Dengan 9 Penyakit Prioritas</p>
2	Dukungan Manajemen	Terwujudnya Pemberian Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja BBPK Ciloto Tahun 2025 dilakukan antara Kepala BBPK Ciloto sebagai penerima amanah dan Direktur Jenderal SDM Kesehatan sebagai pemberi amanah. Perjanjian kinerja BBPK Ciloto Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 1.

Definisi operasional untuk setiap indikator kinerja yang dijadikan sebagai acuan untuk memantau dan evaluasi dari masing-masing Indikator Kinerja Tahun 2024, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/F/159/2024 dapat dilihat pada tabel

Tabel 2.2
Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja	Definisi Operasional
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem Ketahanan	Persentase SDM Kesehatan yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas	Persentase SDM Kesehatan yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-ginjal-hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai melalui capaian 8 indikator pada 1 tahun anggaran yaitu: Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output
Indeks kepuasan masyarakat	Hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat, sesuai dengan permenpan nomor 14 tahun 2017. Nilai minimal pada sekurang kurangnya 3 kali survei triwulanan (Maret, Juni, September, Desember)
Pengembangan model pembelajaran jarak jauh	Jumlah pelatihan klasikal yang dikembangkan menjadi pembelajaran jarak jauh (MOOC, <i>full online</i> , <i>blended</i>)
Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mendapat	Jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk SDM Kesehatan dan non kesehatan pada

sertifikat pada pelatihan terakreditasi	pelatihan terakreditasi (termasuk pelatihan 9 jenis penyakit prioritas dan ketahanan kesehatan)
Nilai Kinerja Anggaran	<p>Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi Anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, Efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA KL secara tahunan 2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam Renja K/L dan Renstra K/L secara tahunan 3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program <p>Cara perhitungan :</p> <p>Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi,konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPKRPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu</p>
Persentase Realisasi Anggaran	<p>Jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi.</p> <p>Cara perhitungan :</p> <p>Jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100</p>

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut, BBPK Ciloto diberikan anggaran sesuai dengan DIPA Nomor SP DIPA-024.12.2.416258/2025 tanggal 02 Desember 2024 dan Revisi DIPA keempat tanggal 26 Juni 2025 sebesar Rp 51.841.749.000,- (Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan nilai *blokir* sebesar Rp 27.659.210.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja BBPK Ciloto Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan	98 %
		2. Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Sesuai Dengan 9 Penyakit Prioritas	98 %
2	Terwujudnya Pemberian Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran	3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
3	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pelatihan SDM Kesehatan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat	85 NIK
		5. Pengembangan Model Pembelajaran Jarak Jauh	5 pelatihan
4	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan Sesuai Standar	6. Jumlah SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi	4.126 sertifikat
5	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Dengan Target Waktu yang Telah Ditetapkan	7. Persentase Realisasi Anggaran	96 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi merupakan suatu capaian atau indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dalam kegiatan/ aktivitas/ program yang telah direncanakan sebelumnya guna mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Kinerja merupakan konsep yang digunakan organisasi untuk menilai hasil dan mencapai tujuan organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing sasaran program/ kegiatan dan indikator kinerja.

Penjelasan terkait pencapaian sasaran program/ kegiatan dan indikator kinerja BBPK Ciloto Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1

Persentase SDM yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan

Definisi Operasional yang digunakan untuk mengukur persentase SDM yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan adalah persentase SDM yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi mendukung ketahanan kesehatan. Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja kegiatan ini adalah 98%.

Realisasi persentase SDM yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan semester I Tahun 2025 sebesar 216,65%. Dengan target kinerja 98%, maka realisasi kinerja menjadi 221,07%.

Perbandingan Indikator Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan Semester I Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Perbandingan Indikator Persentase SDM Kesehatan Yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan Semester I Tahun 2023 - 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023	2024	2025
1	Jumlah SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan	476		
2	Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan		511,10% (10.084)	216,65% (2576)

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan pada semester I Tahun 2025 sebesar 216,65% dari target 98%. Capaian ini bila dibandingkan dengan semester I tahun 2024 cenderung turun, tetapi dari segi jumlah peserta lebih besar dibandingkan dengan semester I tahun 2023.

Perbandingan Capaian Indikator Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan dengan target jangka menengah dan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan sampai dengan dilakukan penyusunan Laporan Kinerja ini, Renstra Kementerian Kesehatan 2025 – 2029 belum disahkan, sehingga BBPK Ciloto belum dapat menyusun Rencana Aksi Kegiatan 2025 – 2029.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi mendukung sistem ketahanan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Kegiatan Capaian Indikator Persentase SDM Kesehatan Yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan

No	Rincian Output	Komponen	Realisasi
1	Pelatihan Surveilans Epidemiology	MOOC Pelatihan Pengendalian Zoonosis dengan Pendekatan <i>One Health</i>	514
2	Pelatihan Terkait Tenaga Cadangan Kesehatan	Pelatihan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan bagi SDM Kesehatan	125
3	Pelatihan Surveilans Epidemiology	MOOC Pelatihan Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Kesehatan	1937
Jumlah			2576

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Efisiensi anggaran ini menyebabkan pelatihan yang semula akan dilakukan dengan metode *blended* atau *full online* menjadi tidak dapat dilaksanakan. Alternatif solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah merubah pelatihan – pelatihan yang semula menggunakan metode *blended* atau *full online* menjadi pelatihan dengan metode *Massive Open Online Course* (MOOC). Apabila pelatihan MOOC telah dilakukan untuk segera melakukan revisi terkait perubahan jenis pelatihan dan revisi terkait perubahan target output.

Pelatihan dengan metode MOOC lebih efisien dalam hal sumber daya, baik sumber daya manusia maupun dari segi pembiayaan. Dari segi sumber daya manusia, metode MOOC tidak memerlukan banyak panitia ataupun pengajar pada saat pelatihan. Dari segi pembiayaan, pelatihan dengan metode MOOC tidak memerlukan anggaran saat pelaksanaannya dibandingkan pelatihan dengan metode *blended* atau *full online*. Waktu pelaksanaan juga lebih fleksibel, karena peserta dapat mengakses materi dan mengikuti pelatihan kapan dan dimana saja tanpa terikat waktu dan tempat pelaksanaan.

Keberhasilan ketercapaian indikator Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan adalah perubahan pelatihan-pelatihan yang semula menggunakan metode *blended* atau *full online* menjadi pelatihan dengan metode MOOC. MOOC Pelatihan Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Kesehatan memperoleh capaian peserta yang lebih besar dibandingkan dengan MOOC lain karena adanya

kolaborasi dengan Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer (PKP). Direktorat Tata Kelola PKP mengeluarkan surat yang mewajibkan keikutsertaan menjadi peserta MOOC Pelatihan Dasar K3 di Laboratorium kepada seluruh Kepala Balai Besar/Balai/Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat, seluruh kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Pelatihan yang dapat dilaksanakan untuk mendukung indikator Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan adalah :

1. MOOC Pelatihan Pengendalian Zoonosis dengan Pendekatan *One Health*
2. MOOC Pelatihan Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Kesehatan

Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas

2

Definisi Operasional yang digunakan untuk mengukur persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas adalah persentase SDM Kesehatan yang lulus mengikuti pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas (Jantung, Kanker, DM-ginjal-hati, Stroke/Otak, KIA, TB, Penyakit Infeksi). Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja kegiatan ini adalah 98%.

Sampai dengan Semester I Tahun 2025 belum terdapat realisasi untuk indikator persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan pelatihan MOOC terkait 9 penyakit prioritas masih dalam tahap uji coba.

Perbandingan Indikator Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Perbandingan Persentase SDM Kesehatan Yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Sesuai Dengan 9 Penyakit Prioritas Semester I Tahun 2023 – 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023	2024	2025
1	Jumlah SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit	135		
2	Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit		58,07 % (421)	0% (0)

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator “Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit pada semester I Tahun 2025 sebesar 0% dari target 98%. Capaian ini bila dibandingkan dengan semester I tahun 2024 mengalami penurunan.

Perbandingan Capaian Indikator Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit dengan target jangka menengah dan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan sampai dengan dilakukan penyusunan Laporan Kinerja ini, Renstra Kementerian Kesehatan 2025 – 2029 belum disahkan, sehingga BBPK Ciloto belum dapat menyusun Rencana Aksi Kegiatan 2025 – 2029.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian target Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas adalah penyusunan kurikulum dengan metode MOOC terkait pelatihan 9 penyakit prioritas. Kurikulum yang telah dikembangkan yaitu :

1. Pelatihan MOOC Pelatihan Dasar Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius
2. MOOC Pelatihan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) Bagi Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3. Pelatihan MOOC Upaya Pencegahan dan Pengendalian Stroke
4. MOOC Pemantauan Pertumbuhan Balita

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Efisiensi anggaran ini menyebabkan pelatihan yang semula akan dilakukan dengan metode *blended* atau *full online* menjadi tidak dapat dilaksanakan. Alternatif solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah merubah pelatihan – pelatihan yang semula menggunakan metode *blended* atau *full online* menjadi pelatihan dengan metode *Massive Open Online Course* (MOOC). Pelatihan MOOC untuk mendukung indikator ini sebagian besar baru mulai didesain pada awal tahun 2025 dan bulan Juni ini baru pada tahap register kurikulum serta ujicoba. Pengembangan MOOC ini memerlukan waktu dalam penyusunan modul serta media karena melibatkan fasilitator yang merupakan praktisi. Untuk MOOC Pemantauan Pertumbuhan Balita sudah pernah dibuat di tahun 2023, namun ada penyesuaian/pembaharuan kurikulum pelatihan di 2025 ini terkait adanya perubahan regulasi ILP serta keterampilan dasar kader yang di *launching* pada 2024 termasuk adanya pembaharuan buku KIA (yang merupakan salah 1 media pembelajaran dalam

MOOC ini). Kurikulum Klasikal baru final teregistrasi revisinya pada bulan Mei 2025 sehingga proses updet media MOOC Pemantauan Pertumbuhan Balita juga dilakukan setelahnya. Apabila pelatihan MOOC telah dilakukan, akan segera melakukan revisi terkait perubahan jenis pelatihan dan revisi terkait perubahan target output. Pelatihan dengan metode MOOC lebih efisien dalam hal sumber daya, baik sumber daya manusia maupun dari segi pembiayaan. Dari segi sumber daya manusia, metode MOOC tidak memerlukan banyak panitia ataupun pengajar pada saat pelatihan. Dari segi pembiayaan, pelatihan dengan metode MOOC tidak memerlukan anggaran saat pelaksanaannya dibandingkan pelatihan dengan metode *blended* atau *full online*. Waktu pelaksanaan juga lebih fleksibel, karena peserta dapat mengakses materi dan mengikuti pelatihan kapan dan dimana saja tanpa terikat waktu dan tempat pelaksanaan.

Kegagalan capaian indikator Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat pada Pelatihan Terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas adalah kurikulum pelatihan dengan metode MOOC baru teregister, sehingga pelatihan belum bisa dilaksanakan. Pelatihan tersebut adalah :

1. Pelatihan MOOC Pelatihan Dasar Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius
2. Pelatihan MOOC Upaya Pencegahan dan Pengendalian Stroke
3. MOOC Pemantauan Pertumbuhan Balita

Solusi yang direncanakan adalah percepatan produksi dan revisi media sehingga pelatihan tersebut diatas dapat segera dilaksanakan, agar persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi sesuai dengan 9 penyakit prioritas dapat tercapai.

3

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Definisi Operasional yang digunakan untuk mengukur Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai melalui 8 capaian indikator pada satu tahun anggaran, yaitu : Revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM dan Capaian output. Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja kegiatan ini adalah 90%.

Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Semester I Tahun 2025 sebesar 94,77%. Dengan target kinerja 90%, maka realisasi kinerja menjadi 105,30%.

Gambar 3.1

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	128	024	416258	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	Nilai	100.00	73.73	93.53	100.00	100.00	100.00	100.00	94.77	100%	0.00	94.77
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.06	18.71	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.87		98.38			100.00					

Perbandingan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 – 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023	2024	2025
1	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93,03%	96,29%	94,77%

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada semester I Tahun 2025 sebesar 94,77 dari target 90%. Capaian ini bila dibandingkan dengan semester I tahun 2024 mengalami penurunan.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan target jangka menengah dan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan sampai dengan dilakukan penyusunan Laporan Kinerja ini, Renstra Kementerian Kesehatan 2025 – 2029 belum disahkan, sehingga BBPK Ciloto belum dapat menyusun Rencana Aksi Kegiatan 2025 – 2029.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah adanya efisiensi anggaran Efisiensi anggaran berdampak pada kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun tidak dapat dilaksanakan. Hal ini berpengaruh pada nilai indikator halaman III DIPA, penyerapan anggaran, dan pengelolaan UP dan TUP. Revisi DIPA yang waktunya bersamaan dengan rencana revisi halaman III DIPA juga mempengaruhi nilai dari IKPA BBPK Ciloto. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan melakukan revisi halaman III DIPA secara berkala, pengajuan perubahan besaran nilai UP dan melakukan input data capaian output tepat waktu.

Keberhasilan ketercapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait penyerapan anggaran, revisi halaman III DIPA dan capaian output
2. Melakukan pengelolaan UP dan TUP
3. Melakukan pengajuan data kontrak tepat waktu
4. Melakukan input data capaian output tepat waktu

Indeks Kepuasan Masyarakat

4

Definisi operasional indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survey kepuasan masyarakat, sesuai dengan Permenpan nomor 14 Tahun 2017. Nilai minimal pada sekurang-kurangnya 3 kali survei triwulanan (Maret, Juni, September, Desember). Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini adalah 85 NIK.

Indeks kepuasan masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Instrumen survei sesuai dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2017, yang kuesionernya mencakup 9 unsur yang harus masuk yaitu :

1. Persyaratan adalah persyaratan pelayanan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur adalah sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan
3. Waktu Penyelesaian adalah waktu Pelayanan, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat; Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat.
5. Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Kompetensi Pelaksana adalah Kompetensi Pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

8. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan, saran dan masukan sesuai dengan standar yang berlaku.
9. Sarana dan Prasarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) dan prasarana benda yang tidak bergerak (gedung).

Nilai dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

Realisasi indikator indeks kepuasan masyarakat pada semester I tahun 2025 adalah 92,16 NIK. Dengan target kinerja 85 NIK, maka realisasi kinerja menjadi 103,98%. Nilai ini merupakan rata-rata dari nilai IKM triwulan I dan Triwulan II Tahun 2025.

Perbandingan indikator indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2023 – 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023	2024	2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,83	87,98	92,16

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator indeks kepuasan masyarakat pada semester I Tahun 2025 sebesar 92,16 NIK dari target 85 NIK. Capaian ini bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 mengalami peningkatan.

Perbandingan capaian indikator indeks kepuasan masyarakat dengan target jangka menengah dan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan sampai dengan dilakukan penyusunan Laporan Kinerja ini, Renstra Kementerian Kesehatan 2025 – 2029 belum disahkan, sehingga BBPK Ciloto belum dapat menyusun Rencana Aksi Kegiatan 2025 – 2029.

Hambatan yang dihadapi dalam melakukan survey kepuasan masyarakat adalah kurangnya antusias responden untuk mengisi survey. Dari sisi unsur yang dinilai, hambatan yang dihadapi adalah kurangnya respon petugas terhadap pengaduan sehingga tindak lanjut pengaduan lambat, petugas kurang ramah, kurang informatif atau kurang sigap dalam melayani, fasilitas pelayanan kurang nyaman atau rusak,. Alternatif solusi yang dilakukan adalah melakukan *blast* kepada responden untuk total populasi, adanya *channel* pengaduan 24 jam (*omni channel*), melakukan *reward* dan *punishment* untuk kinerja layanan, pemeliharaan berkala terhadap fasilitas pelayanan, serta melakukan tindak lanjut yang cepat terhadap aduan masyarakat.

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu faktor fundamental yang mempengaruhi kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Semakin efisien sumber daya digunakan, maka semakin besar kemungkinan masyarakat akan:

1. Merasa dilayani secara cepat dan tepat,
2. Menilai layanan sebagai profesional,
3. Menyatakan kepuasan tinggi dalam survei kepuasan masyarakat.

Efisiensi SDM ditentukan oleh rasio jumlah petugas terhadap beban layanan, kompetensi, dan produktivitas. SDM yang berlebih tanpa peran jelas merupakan pemborosan. SDM yang terlalu sedikit akan menyebabkan pelayanan lambat sehingga waktu tunggu lama. Hal tersebut dapat menurunkan kepuasan masyarakat. Efisien akan terjadi dengan baik bila penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan beban kerja merata untuk setiap SDM.

Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025, diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai IKM pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa BBPK Ciloto terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya secara lebih efisien dan tepat sasaran. Upaya-upaya perbaikan dan inovasi yang dilakukan berkontribusi positif terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Kegiatan yang dilakukan BBPK Ciloto atas keberhasilan ketercapaian indikator indeks kepuasan masyarakat adalah :

1. Layanan pengaduan 24 jam melalui omni channel : pengaduan ditangani tepat waktu, tepat sasaran
2. Pelayanan yang Cepat dan Responsif : petugas memberikan layanan tepat waktu sesuai SOP dan memberikan respon dengan cepat terhadap pengaduan atau pertanyaan masyarakat
3. Kualitas SDM yang Profesional : pegawai memiliki kompetensi, sikap ramah, dan mampu berkomunikasi dengan baik
4. Kemudahan Akses Layanan : layanan mudah dijangkau, baik secara fisik maupun digital (layanan online) dan Informasi layanan tersedia secara jelas dan terbuka
5. Fasilitas Pendukung yang Memadai : Sjsarana dan prasarana layanan dalam kondisi baik
6. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik : pelayanan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan dalam maklumat layanan

5

Pengembangan Model Pembelajaran Jarak Jauh

Definisi operasional indikator pengembangan model pembelajaran jarak jauh adalah jumlah pelatihan klasikal yang dikembangkan menjadi pembelajaran jarak jauh (MOOC, *full online*, *blended*). Target kinerja untuk indikator ini adalah 5 pelatihan.

Realisasi indikator pengembangan model pembelajaran jarak jauh pada semester I tahun 2025 adalah 3 pelatihan. Dengan target kinerja 5 pelatihan, maka realisasi kinerja menjadi 60%. Pelatihan yang telah dikembangkan tersebut adalah :

1. MOOC Upaya Pencegahan dan Pengendalian Stroke
2. MOOC Media Presentasi Level Dasar
3. MOOC Pelatihan Dasar Transportasi dan Pengiriman Bahan Infeksius

Perbandingan indikator pengembangan model pembelajaran jarak jauh tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Pengembangan Model Pembelajaran Jarak Jauh
Semester I Tahun 2023 – 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023	2024	2025
1	Jumlah pelatihan yang menggunakan model MOOC	2		
2	Pengembangan model pembelajaran jarak jauh		2	3

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator pengembangan model pembelajaran jarak jauh pada semester I Tahun 2025 adalah 3 pelatihan dari target 5 pelatihan. Capaian ini bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 mengalami peningkatan.

Perbandingan capaian indikator pengembangan model pembelajaran jarak jauh dengan target jangka menengah dan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan sampai dengan dilakukan penyusunan Laporan Kinerja ini, Renstra Kementerian Kesehatan 2025 – 2029 belum disahkan, sehingga BBPK Ciloto belum dapat menyusun Rencana Aksi Kegiatan 2025 – 2029.

Indikator pengembangan model pembelajaran jarak jauh dapat tercapai karena adanya kolaborasi antara pengembang BBPK Ciloto, unit program diantaranya Direktorat Tata Kelola PKP, Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan, UPT Laboratorium Kementerian Kesehatan, Direktorat Penyakit Tidak Menular, Organisasi

Profesi, dan Direktorat Mutu SDM Kesehatan. Komitmen antar pihak dan *timeline* yang dikelola oleh setiap PIC juga menjadi faktor tercapainya indikator ini.

Tahapan kegiatan dalam penyusunan MOOC adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan kurikulum
2. Penyusunan materi
3. Penyusunan soal
4. Registrasi kurikulum
5. Identifikasi kebutuhan media, dan
6. Pengembangan media

Jumlah SDM Kesehatan dan Nonkesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi

6

Definisi operasional jumlah SDM kesehatan dan nonkesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi adalah jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk SDM kesehatan dan nonkesehatan pada pelatihan terakreditasi (termasuk pelatihan 9 penyakit prioritas dan ketahanan kesehatan). Target untuk indikator ini adalah 4126 sertifikat.

Realisasi indikator jumlah SDM kesehatan dan nonkesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi pada semester I tahun 2025 sebesar 5653 sertifikat. Dengan target kinerja 4126 sertifikat, maka realisasi kinerja menjadi 137,01%.

Perbandingan indikator indikator jumlah SDM kesehatan dan nonkesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Perbandingan Jumlah SDM Kesehatan dan Nonkesehatan Yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Semester I Tahun 2023 – 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023	2024	2025
1	Jumlah SDM kesehatan dan nonkesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	1689	11947	5653

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator jumlah SDM kesehatan dan nonkesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi pada semester I tahun 2025 sebesar 5653 sertifikat dari target 4126 sertifikat. Capaian ini bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 mengalami penurunan.

Perbandingan capaian indikator jumlah SDM kesehatan dan nonkesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi dengan target jangka menengah dan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan sampai dengan dilakukan penyusunan Laporan Kinerja ini, Renstra Kementerian Kesehatan 2025 – 2029 belum disahkan, sehingga BBPK Ciloto belum dapat menyusun Rencana Aksi Kegiatan 2025 – 2029.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target jumlah SDM kesehatan dan nonkesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Efisiensi anggaran ini menyebabkan pelatihan yang semula akan dilakukan dengan metode *blended* atau *full online* menjadi tidak dapat dilaksanakan. Alternatif solusi yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah merubah pelatihan – pelatihan yang semula menggunakan metode *blended* atau *full online* menjadi pelatihan dengan metode *Massive Open Online Course* (MOOC).

Pelatihan dengan metode MOOC lebih efisien dalam hal sumber daya, baik sumber daya manusia maupun dari segi pembiayaan. Dari segi sumber daya manusia, metode MOOC tidak memerlukan banyak panitia ataupun pengajar pada saat pelatihan. Dari segi pembiayaan, pelatihan dengan metode MOOC tidak memerlukan anggaran saat pelaksanaannya dibandingkan pelatihan dengan metode *blended* atau *full online*. Waktu pelaksanaan juga lebih fleksibel, karena peserta dapat mengakses materi dan mengikuti pelatihan kapan dan dimana saja tanpa terikat waktu dan tempat pelaksanaan.

Keberhasilan ketercapaian indikator target jumlah SDM kesehatan dan nonkesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi adalah perubahan pelatihan-pelatihan yang semula menggunakan metode *blended* atau *full online* menjadi pelatihan dengan metode MOOC. Pelatihan yang dapat dilaksanakan untuk mendukung indikator target jumlah SDM kesehatan dan nonkesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi adalah :

1. Pelatihan MOOC Manajemen Pelatihan Bagi Pimpinan Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan
2. Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C model MOOC
3. Pelatihan MOOC Pelayanan Prima Bagi SDM Rumah Sakit
4. MOOC Pelatihan Dasar Surveilans Penyakit Campak Rubella
5. Pelatihan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan Bagi SDM Kesehatan
6. MOOC Pelatihan Dasar Surveilans *Accute Flaccid Paralysis* (AFP)
7. MOOC Pelatihan Dasar Pengendalian Zoonosis Dengan Pendekatan *One Health*
8. MOOC Pelatihan Kefarmasian
9. Pelatihan Panitia Pelaksana Ibadah Haji
10. Pelatihan Tenaga Kesehatan Haji Kloter

11. Pelatihan Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan bagi SDM Kesehatan

7

Nilai Kinerja Anggaran

Definisi operasional indikator nilai kinerja anggaran adalah Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari:

1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi Anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, Efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA KL secara tahunan
2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam Renja K/L dan Renstra K/L secara tahunan
3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program

Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini adalah 80,1.

Realisasi indikator nilai kinerja anggaran pada semester I tahun 2025 adalah sebesar 52,59. Dengan target kinerja 80,1, maka realisasi kinerja menjadi 65,66%.

Perbandingan capaian indikator nilai kinerja anggaran dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan. Hal ini karena indikator kinerja kegiatan nilai kinerja anggaran merupakan indikator yang baru ada pada tahun 2025.

Perbandingan Capaian Indikator nilai kinerja anggaran dengan target jangka menengah dan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan sampai dengan dilakukan penyusunan Laporan Kinerja ini, Renstra Kementerian Kesehatan 2025 – 2029 belum disahkan, sehingga BBPK Ciloto belum dapat menyusun Rencana Aksi Kegiatan 2025 – 2029.

Capaian indikator nilai kinerja anggaran baru dapat tercapai sesuai target pada akhir tahun anggaran. Perhitungan penilaian pada aspek implementasi berupa realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian kinerja baru mendapat nilai maksimal di akhir tahun. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target nilai kinerja anggaran adalah :

1. Rapat monitoring dan evaluasi realisasi anggaran dan capaian output secara berkala.
2. Penyusunan laporan capaian output dari masing-masing ketua tim kerja sebagai bahan untuk pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI

3. Pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulan secara tepat waktu



Definisi operasional indikator persentase realisasi anggaran adalah persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi. Target yang ditetapkan untuk indikator kinerja kegiatan ini adalah 96%.

Realisasi indikator persentase realisasi anggaran pada semester I tahun 2025 sebesar 20,99%. Dengan target kinerja 96%, maka realisasi kinerja menjadi 21,86%.

Gambar 3.2
Realisasi Anggaran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Bulan : 01 s.d. 06

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	416258 BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	PAGU	13,193,480,000	38,648,269,000	0	0	0	0	0	0	0	51,841,749,000
		REALISASI	7,276,283,075 (55.15%)	3,607,333,068 (9.33%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10,883,616,143 (20.99%)
		SISA	5,917,196,925	35,040,935,932	0	0	0	0	0	0	0	40,958,132,857
GRAND TOTAL		PAGU	13,193,480,000	38,648,269,000	0	0	0	0	0	0	0	51,841,749,000
		REALISASI	7,276,283,075 (55.15%)	3,607,333,068 (9.33%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	10,883,616,143 (20.99%)
		SISA	5,917,196,925	35,040,935,932	0	0	0	0	0	0	0	40,958,132,857

Perbandingan indikator persentase realisasi anggaran tahun 2023 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Semester I Tahun 2023 - 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	2023	2024	2025
1	Persentase realisasi anggaran		42,33	20,99

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator persentase realisasi anggaran pada semester I Tahun 2025 sebesar 20,99% dari target 96%. Capaian ini bila dibandingkan dengan semester I tahun 2024 mengalami penurunan.

Perbandingan Capaian Indikator persentase realisasi anggaran dengan target jangka menengah dan dengan standar nasional tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan sampai dengan dilakukan penyusunan Laporan Kinerja ini, Renstra Kementerian Kesehatan 2025 – 2029 belum disahkan, sehingga BBPK Ciloto belum dapat menyusun Rencana Aksi Kegiatan 2025 – 2029.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator persentase realisasi anggaran adalah adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Anggaran untuk kegiatan-kegiatan pelatihan diblokir sehingga pelatihan yang telah direncanakan di awal tahun tidak dapat dilaksanakan. Selain Inpres tersebut, terdapat surat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor S-27/PB/2025 tentang dukungan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam surat tersebut diberitahukan untuk melakukan penundaan sementara untuk proses perikatan/kontrak barang/jasa, terutama dari jenis belanja barang dan belanja modal. Alternatif solusi yang dilakukan adalah segera melakukan pengadaan barang/ jasa setelah kebijakan penundaan perikatan dicabut. Kegiatan-kegiatan operasional perkantoran untuk mendukung pelayanan tetap dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan mengenai efisiensi anggaran.

Efisiensi sumber daya yang dilakukan adalah melakukan pelatihan-pelatihan dengan metode MOOC, sehingga pelatihan tidak memerlukan anggaran tetapi capaian output tetap tercapai. Pengajar dioptimalkan dilakukan oleh internal, sehingga pelatihan dengan metode *full online* tetap dapat dilaksanakan tanpa mengeluarkan biaya.

Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi capaian persentase realisasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS
2. Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK
3. Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan Perkantoran
4. Perawatan Gedung dan Bangunan
5. Perawatan Sarana Gedung
6. Pemeliharaan Kendaraan
7. Pengadaan Perlengkapan Kantor
8. Pemeliharaan Daya dan Jasa
9. Keperluan sehari-hari perkantoran

B. Capaian Kinerja Lainnya

Selain melakukan pelatihan dengan sumber dana DIPA BBPK Ciloto, sampai dengan semester I Tahun 2025, BBPK Ciloto telah melakukan kerjasama dengan :

1. Health Security Partners (HSP)
2. Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan
3. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Rumah Sakit Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
5. Rumah Sakit Prof. Dr. Soerojo Magelang

Realisasi pelatihan yang dilaksanakan melalui kerjasama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Realisasi Pelatihan Kerjasama

No	Instansi	Nama Pelatihan	Realisasi Peserta
1	Health Security Patners (HSP)	Pelatihan Epidemiologi Lapangan Level Intermediate Bagi Tenaga Epidemiolog Di Dinas Kesehatan Dan Balai Kekeparantinaan Kesehatan	
2	Health Security Patners (HSP)	Pelatihan Bagi Mentor Field Epidemiology Training Program Ak 1	21
3	Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	Pelatihan Kompetensi PBJ Level 1	26
4	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelatihan Pengelola Imunisasi di Puskesmas Akt 1	18
5	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelatihan Surveilans Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) bagi Petugas Surveilans di Puskesmas	20
6	RSCM	Pelatihan Kompetensi PBJ Level 1	40
7	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa	21
8	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelatihan Pelayanan Antenatal Care, Persalinan, Nifas Dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Bagi Bidan di FKTP	25
9	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelatihan Pengelola Imunisasi di Puskesmas Akt 2	20
10	RS Prof. Soerojo Magelang	MOOC Pelatihan Pelayanan Prima Bagi SDM RS AK. 3	276
11	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelatihan Konseling Menyusui Angkatan 1	25
12	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa Angkatan 2	30
13	RS Prof. Soerojo Magelang	MOOC Pelatihan Pelayanan Prima Bagi SDM RS AK. 4	322
14	Health Security Patners (HSP)	Pelatihan Epidemiologi Level Frontline bagi Tenaga Kesehatan di Tingkat Puskesmas/Rumah Sakit/Labkesmas	
15	Direktorat Kesehatan Keluarga	Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Pada balita dan Anak Prasekolah Bagi Tenaga Kesehatan	24
16	Health Security Patners (HSP)	Pelatihan Bagi Mentor Field Epidemiology Training Program Ak 2	21
17	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelatihan Pengelola Imunisasi di Puskesmas Akt 3	30
18	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelatihan Pelayanan ANC dan Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas Melalui Blended Learning	17
19	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa Akt 3	20
20	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelatihan Pelayanan Antenatal Care, Persalinan, Nifas Dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) Bagi Bidan di FKTP Akt 2	24
21	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Akt 1	27

Sebagai lembaga pelatihan, BBPK Ciloto memperoleh akreditasi oleh 3 lembaga, yaitu :

1. Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan dengan predikat “A” oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
2. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan predikat “A” oleh Lembaga Administrasi Negara
3. Lembaga Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan predikat “A” oleh Lembaga Administrasi Negara
4. Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) dengan predikat “A” oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Perpustakaan terakreditasi dengan predikat “A” oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Penghargaan yang diperoleh BBPK Ciloto pada semester I tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pada bulan Februari 2025, memperoleh penghargaan dari KPPN Sukabumi sebagai satker terbaik dengan jumlah transaksi CMS terbanyak periode Semester II Tahun 2024 “Kategori Rekening BPG”, satker terbaik dengan jumlah transaksi digipay terbanyak lingkup KPPN Sukabumi periode Semester II Tahun 2024, dan satker terbaik dengan jumlah transaksi kartu kredit pemerintah terbanyak terbanyak lingkup KPPN Sukabumi periode Semester II Tahun 2024.
2. Pada bulan Maret 2025, memperoleh peringkat 3 LPPBJ yang memiliki *Compliance Index* (CI) sempurna dan peringkat 1 Peningkatan Nilai Evaluasi Pelatihan PBJ *Pretest* ke *Postest* tertinggi dari Pusat Pelatihan SDM PBJ

Saat ini BBPK Ciloto sedang dalam proses penilaian akreditasi kearsipan yang dilakukan oleh Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan penilaian. Selain itu, BBPK Ciloto juga diusulkan sebagai salah satu Satuan Kerja di Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk menuju WBK Nasional di Tahun 2025.

C. Realisasi Anggaran

Pagu awal anggaran BBPK Ciloto Tahun 2025 sebesar Rp 53.171.873.000 (*Lima Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) yang telah ditetapkan pada DIPA Nomor SP DIPA-024.12.2.416258/2025 tanggal 02 Desember 2024. Sampai dengan bulan Juni 2025 telah dilakukan 4 (empat) kali revisi pagu anggaran terkait kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Revisi keempat terbit pada tanggal 26 Juni 2025 dengan nilai pagu sebesar Rp 51.841.749.000,- (*Lima Puluh Satu Milyar*

Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan nilai *blokir* sebesar Rp 27.659.210.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Realisasi anggaran pada semester I tahun 2025 adalah Rp 10.883.616.143,- (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 20,99% dari pagu anggaran atau 45,01% dari pagu efektif. Realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	13.193.480.000	7.276.283.075	5.917.283.075	55,15
2	Belanja Barang	38.648.269.000	3.607.333.066	35.040.935.932	9,33
Total		51.841.749.000	10.883.616.143	40.958.132.857	20,99

Sebagai satker PNBPN, BBPK Ciloto mempunyai target PNBPN sebesar Rp 2.365.725.000 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). Penerimaan PNBPN BBPK Ciloto terdiri dari penerimaan PNBPN fungsional dan penerimaan PNBPN umum. Realisasi PNBPN sampai dengan tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp 373.631.294 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau 15,79%. Realisasi PNBPN per jenis penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi PNBPN per Jenis Penerimaan

No	Kode Akun	Jenis Penerimaan	Realisasi
1	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai Dengan Tusi	154.478.100
2	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	130.960.000
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	70.875.500
4	411618	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	17.317.694
Total			373.631.294

Kendala yang dihadapi untuk mencapai target penerimaan PNBPN adalah adanya blokir anggaran untuk pelatihan bersumber dana PNBPN, sehingga pelatihan tidak dapat dilaksanakan yang berimbas pada tidak adanya penerimaan PNBPN dari peserta pelatihan. Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai target penerimaan PNBPN adalah

melakukan buka blokir untuk pelatihan bersumber dana PNBP dan melakukan promosi untuk penggunaan akomodasi di BBPK Ciloto.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Secara umum hasil capaian kinerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto Semester I Tahun 2025 telah tercapai sesuai rencana kinerja yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto didukung oleh kerja sama antara Subbagian Administrasi Umum dengan Tim Kerja serta Widyaiswara. Capaian kinerja kegiatan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto untuk tahun 2025 yang diukur melalui delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara rata-rata adalah 83,12%, artinya dapat dikatakan bahwa kinerja BBPK Ciloto selaras dengan perencanaan. Dari sisi anggaran dengan segala strategi dan upaya, pada semester I Tahun 2025 ini BBPK Ciloto meraih capaian 20,99 % atau terealisasi Rp 10.883.616.143,-

Upaya dan rekomendasi yang akan dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja BBPK Ciloto, antara lain :

1. Revisi anggaran terkait penyesuaian jenis pelatihan;
2. Revisi anggaran terkait target output
3. Melaksanakan pelatihan MOOC untuk pelatihan yang telah selesai kurikulumnya.
4. Menyusun kurikulum MOOC terkait pelatihan sesuai dengan 9 penyakit prioritas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, satker Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto ini kami buat, sebagai langkah dari perbaikan kinerja dan bukti pertanggungjawaban kinerja yang ada, dalam upaya pencapaian sasaran dalam tujuan yang telah dibuat. Laporan ini masih jauh dari sempurna, perbaikan dan evaluasi akan selalu kami lakukan demi perbaikan semua sistem pelaporan tahunan ini.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sjamsul Ariffin
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yuli Farianti
Jabatan : Plt Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal
Tenaga Kesehatan,

Pihak Pertama
Kepala
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto,

Yuli Farianti

Sjamsul Ariffin

Program**Anggaran**

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 20.428.506.000
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 32.743.367.000
Total Anggaran	Rp. 53.171.873.000

Jakarta, 2 Januari 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal
Tenaga Kesehatan,



Yuli Farianti

Pihak Pertama
Kepala
Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto,



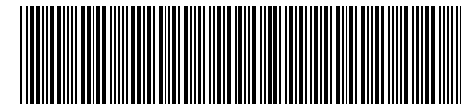
Sjamsul Ariffin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

No.	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar/ Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1. Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan	98%
		2. Persentase SDM Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi Sesuai Dengan 9 Penyakit Prioritas	98%
2	Terwujudnya Pemberian Dukungan Manajemen dan Layanan Perkantoran	3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90%
3	Terselenggaranya Pelaksanaan dan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pelatihan SDM Kesehatan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat	85 NIK
		5. Pengembangan Model Pembelajaran Jarak Jauh	5 Pelatihan
4	Meningkatnya Pemenuhan SDMK Sesuai Standar	6. Jumlah SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan Terakreditasi	4126 Sertifikat
5	Terlaksananya Direktif Pimpinan Sesuai Dengan Target Waktu yang Telah Ditetapkan	7. Nilai Kinerja Anggaran	80,1
		8. Persentase Realisasi Anggaran	96%



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 024.12.2.416258/2025**



DS:6030-5519-2885-5393

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
2. Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
3. Provinsi : (02) JAWA BARAT
4. Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
- Sebesar : Rp. 53.171.873.000 (LIMA PULUH TIGA MILIAR SERATUS TUJUH PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 07 KESEHATAN
07.90 KESEHATAN LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	51.019.064.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	2.152.809.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SUKABUMI (128) Rp. 53.171.873.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

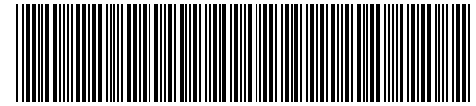
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025



DS:6030-5519-2885-5393

Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	20.428.506.000
DL.6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Rp.	20.428.506.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	32.743.367.000
WA.4399	Tata Kelola SDM	Rp.	4.079.995.000
WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	Rp.	28.663.372.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6030-5519-2885-5393

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : I A. 1

Program	:	024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			20.428.506.000
Kegiatan	:	6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan			20.428.506.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi			
		2. 02	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi			
		3. 03	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi			
		4. 04	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas			
		5. 05	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6822.ADE Akreditasi Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja	315.412.000
Rincian Output	:	01	ADE.101 Akreditasi Institusi Pelatihan UPT BBPK/BAPELKES	1,00	Lembaga	315.412.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6822.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	236.260.000
Rincian Output	:	01	AFA.102 Media dan Modul Pelatihan Bidang Kesehatan	10,00	Pedoman	236.260.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6822.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	100,00	Orang, Unit Kerja, Tim	463.350.000
Rincian Output	:	01	BDC.100 Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	100,00	Orang	463.350.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6822.BGD Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	1,00	Lembaga	435.240.000
Rincian Output	:	01	BGD.100 Tata Kelola Bersumber Dana PNBPN	1,00	Lembaga	435.240.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6822.DCM Pelatihan Bidang Kesehatan	1.727,00	Orang, Kegiatan	10.996.055.000
Rincian Output	:	01	DCM.101 Pelatihan Teknis Kesehatan	1133,00	Orang	7.422.940.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6030-5519-2885-5393

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : I A. 2

Pelatihan Bidang Kesehatan				Orang, Kegiatan		
	02	DCM.201	Pelatihan Penunjang Kinerja Organisasi	594.00	Orang	3.573.115.000
Klasifikasi Rincian Output	6	: 6822.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	1.599,00	Orang, Kegiatan	7.982.189.000
Rincian Output		: 01	SCM.100 Pelatihan Surveilans Epidemiology	60.00	Orang	508.875.000
		: 02	SCM.101 Pelatihan 9 Penyakit Prioritas	325.00	Orang	2.470.022.000
		: 03	SCM.102 Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional	439.00	Orang	3.441.157.000
		: 04	SCM.103 Pelatihan Stunting (PN)	85.00	Orang	720.760.000
		: 05	SCM.104 Pelatihan Terkait Tenaga Cadangan Kesehatan	690.00	Orang	841.375.000
Program		: 024.12.WA	Program Dukungan Manajemen			32.743.367.000
Kegiatan		: 4399	Tata Kelola SDM			4.079.995.000
Indikator Kinerja Kegiatan		: 1. 01	Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya			
Klasifikasi Rincian Output	1	: 4399.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	800,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	4.079.995.000
Rincian Output		: 01	EBC.100 Layanan Pendidikan dan Pelatihan ASN Kementerian Kesehatan	800.00	Orang	4.079.995.000
Kegiatan		: 6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan			28.663.372.000
		: 1. 01	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			
		: 2. 02	Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			
Klasifikasi Rincian Output	2	: 6798.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	3,00	Kelompok Masyarakat	862.530.000
Rincian Output		: 01	BDD.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	3.00	Kelompok Masyarakat	862.530.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6030-5519-2885-5393

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	3	:	6798.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	105,00	Unit	107.500.000
Rincian Output		:	01	CCL.002 Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	105,00	Unit	107.500.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	26.901.666.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	6,00	Layanan	53.560.000
		:	02	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	725.411.000
		:	03	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	26.122.695.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6798.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	164,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	481.962.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	82,00	Orang	43.842.000
		:	02	EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	82,00	Orang	438.120.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6798.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	309.714.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	73.136.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	54.244.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	82.494.000
		:	04	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,00	Dokumen	99.840.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

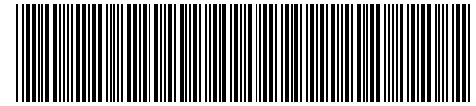
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025

I B. SUMBER DANA



DS:6030-5519-2885-5393

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
 Provinsi : (02) JAWA BARAT
 Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

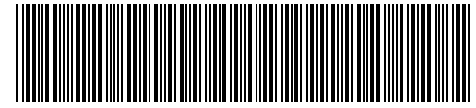
				Pagu			Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	53.171.873.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	51.019.064.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	2.152.809.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6030-5519-2885-5393

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416258	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	13.193.480	39.978.393	-	-	-	53.171.873		
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	20.428.506	-	-	-	20.428.506		
6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	-	20.428.506	-	-	-	20.428.506		
6822.ADE	Akreditasi Lembaga (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	315.412	-	-	-	315.412	02 . 07	
01	RM	-	315.412	-	-	-	315.412	128@	
6822.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	236.260	-	-	-	236.260	02 . 07	
01	RM	-	236.260	-	-	-	236.260	128@	
6822.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	463.350	-	-	-	463.350	02 . 07	
01	RM	-	463.350	-	-	-	463.350	128@	
6822.BGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	435.240	-	-	-	435.240	02 . 07	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6030-5519-2885-5393

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNB		-	435.240	-	-	-	435.240	128	
6822.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	10.996.055	-	-	-	10.996.055	02 . 07	
01 RM		-	9.278.486	-	-	-	9.278.486	128@	
04 PNB		-	1.717.569	-	-	-	1.717.569	128@	
6822.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	7.982.189	-	-	-	7.982.189	02 . 07	
01 RM		-	7.982.189	-	-	-	7.982.189	128@	
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	13.193.480	19.549.887	-	-	-	32.743.367		
4399	Tata Kelola SDM	-	4.079.995	-	-	-	4.079.995		
4399.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	4.079.995	-	-	-	4.079.995	02 . 07	
01 RM		-	4.079.995	-	-	-	4.079.995	128@	
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	13.193.480	15.469.892	-	-	-	28.663.372		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6030-5519-2885-5393

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6798.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	862.530	-	-	-	862.530	02 . 07	
01	RM	-	862.530	-	-	-	862.530	128@	
6798.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	107.500	-	-	-	107.500	02 . 07	
01	RM	-	107.500	-	-	-	107.500	128	
6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	13.193.480	13.708.186	-	-	-	26.901.666	02 . 07	
01	RM	13.193.480	13.708.186	-	-	-	26.901.666	128@	
6798.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	481.962	-	-	-	481.962	02 . 07	
01	RM	-	481.962	-	-	-	481.962	128@	
6798.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	309.714	-	-	-	309.714	02 . 07	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:6030-5519-2885-5393

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
01	RM	-	309.714	-	-	-	309.714	128@	
JUMLAH		13.193.480	39.978.393	-	-	-	53.171.873		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6030-5519-2885-5393

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	416258	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO													
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.390.729	4.476.935	4.482.307	4.406.929	4.533.829	4.461.884	4.398.929	4.400.329	4.412.129	4.410.329	4.410.329	4.387.214	53.171.873
		BELANJA PEGAWAI	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.541	13.193.480
		BELANJA BARANG	3.291.280	3.377.486	3.382.858	3.307.480	3.434.380	3.362.435	3.299.480	3.300.880	3.312.680	3.310.880	3.310.880	3.287.673	39.978.393
	024.12.DL.6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	1.662.181	1.748.387	1.753.759	1.678.381	1.805.281	1.733.336	1.670.381	1.671.781	1.683.581	1.681.781	1.681.781	1.657.875	20.428.506
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.662.181	1.748.387	1.753.759	1.678.381	1.805.281	1.733.336	1.670.381	1.671.781	1.683.581	1.681.781	1.681.781	1.657.875	20.428.506
	024.12.WA.4399	Tata Kelola SDM	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	340.061	4.079.995
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	339.994	340.061	4.079.995
	024.12.WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	2.388.554	2.388.554	2.388.554	2.388.554	2.388.554	2.388.554	2.388.554	2.388.554	2.388.554	2.388.554	2.388.554	2.389.278	28.663.372
		51 BELANJA PEGAWAI	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.449	1.099.541	13.193.480
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	1.289.105	1.289.105	1.289.105	1.289.105	1.289.105	1.289.105	1.289.105	1.289.105	1.289.105	1.289.105	1.289.105	1.289.737	15.469.892
		PERKIRAAN PENERIMAAN	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.152	2.365.725
		- PNBP (425151)	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.103	385.225
		- PNBP (425421)	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.049	1.980.500

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6030-5519-2885-5393

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [416258] BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
416258	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 6.809.183	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	52 Belanja Barang Rp. 6.809.183		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 160.370
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6822.ADE	Akreditasi Lembaga	6822.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 124.675		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.108.307
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6822.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.625
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.730		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	024.12.WA	Program Dukungan Manajemen
6822.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	4399	Tata Kelola SDM
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	4399.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 133.082	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 494.340
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.425	6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	6798.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
6822.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 217.569
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.918.365		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
IV A. B L O K I R**



DS:6030-5519-2885-5393

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [416258] BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	<p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 318.335</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.500</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>		
6798.EBC	<p>Layanan Manajemen SDM Internal</p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 166.173</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.800</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>		
6798.EBD	<p>Layanan Manajemen Kinerja Internal</p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 79.662</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.225</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:6030-5519-2885-5393

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [416258] BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 024.12.2.416258/2025**



DS:3023-5006-6620-0085

Revisi ke 04

Tanggal : 26 Juni 2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 2. Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 3. Provinsi : (02) JAWA BARAT
 4. Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
- Sebesar : Rp. 51.841.749.000 (LIMA PULUH SATU MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 07 KESEHATAN
07.90 KESEHATAN LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	49.688.940.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	2.152.809.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SUKABUMI (128) Rp. 51.841.749.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

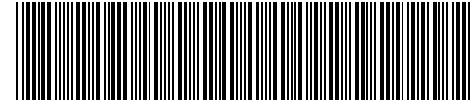
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025



DS:3023-5006-6620-0085

Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	20.113.773.000
DL.6822	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	20.113.773.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	31.727.976.000
WA.4399	Tata Kelola SDM	Rp.	3.979.995.000
WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	27.747.981.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



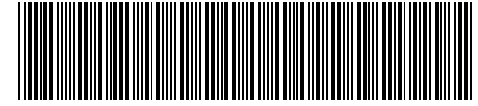
DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : I A. 1

Program	:	024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			20.113.773.000
Kegiatan	:	6822	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan			20.113.773.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi			
		2. 01	Presentase Kab/Kota yang memiliki institusi penyelenggara pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan terakreditasi			
		3. 02	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi			
		4. 02	Persentase SDM Kesehatan yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan			
		5. 03	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi			
		6. 04	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas			
		7. 05	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6822.ADE	Akreditasi Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja	394.432.000
Rincian Output	:	01 ADE.101	Akreditasi Institusi Pelatihan UPT BBPK/BAPELKES	1,00	Lembaga	394.432.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6822.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	188.610.000
Rincian Output	:	01 AFA.102	Media dan Modul Pelatihan Bidang Kesehatan	10,00	Pedoman	188.610.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6822.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	100,00	Orang, Unit Kerja, Tim	870.692.000
Rincian Output	:	01 BDC.100	Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat	100,00	Orang	870.692.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	6822.BGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan	1,00	Lembaga	435.240.000
Rincian Output	:	01 BGD.100	Tata Kelola Bersumber Dana PNBP	1,00	Lembaga	435.240.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	5	:	6822.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan		1.421,00	Orang, Kegiatan	10.242.610.000
Rincian Output		:	01	DCM.101	Pelatihan Teknis Kesehatan	827,00	Orang	6.669.495.000
		:	02	DCM.201	Pelatihan Penunjang Kinerja Organisasi	594,00	Orang	3.573.115.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6822.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan		1.599,00	Orang, Kegiatan	7.982.189.000
Rincian Output		:	01	SCM.100	Pelatihan Surveilans Epidemiology (PN)	60,00	Orang	508.875.000
		:	02	SCM.101	Pelatihan 9 Penyakit Prioritas (PN)	325,00	Orang	2.470.022.000
		:	03	SCM.102	Pelatihan Sistem Kesehatan Nasional (PN)	439,00	Orang	3.441.157.000
		:	04	SCM.103	Pelatihan Stunting (PN)	85,00	Orang	720.760.000
		:	05	SCM.104	Pelatihan Terkait Tenaga Cadangan Kesehatan (PN)	690,00	Orang	841.375.000
Program		:	024.12.WA	Program Dukungan Manajemen				31.727.976.000
Kegiatan		:	4399	Tata Kelola SDM				3.979.995.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan yang Ditingkatkan Kualifikasinya				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4399.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		800,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	3.979.995.000
Rincian Output		:	01	EBC.100	Layanan Pendidikan dan Pelatihan ASN Kementerian Kesehatan	800,00	Orang	3.979.995.000
Kegiatan		:	6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan				27.747.981.000
		:	1. 01	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan				
		:	2. 01	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal SDM Kesehatan				
		:	3. 02	Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	2	:	6798.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	105,00	Unit	107.500.000
Rincian Output		:	01	CCL.002 Layanan Pemeliharaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penunjang Perkantoran	105,00	Unit	107.500.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	26.845.982.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	6,00	Layanan	53.560.000
		:	02	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	669.727.000
		:	03	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	26.122.695.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6798.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	164,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	486.641.000
Rincian Output		:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	82,00	Orang	43.401.000
		:	02	EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	82,00	Orang	443.240.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6798.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	4,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	307.858.000
Rincian Output		:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	Dokumen	73.136.000
		:	02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	Dokumen	54.244.000
		:	03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,00	Dokumen	82.494.000
		:	04	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1,00	Dokumen	97.984.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025

I B. SUMBER DANA



DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 Provinsi : (02) JAWA BARAT
 Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : I B. 1

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	51.841.749.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	49.688.940.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



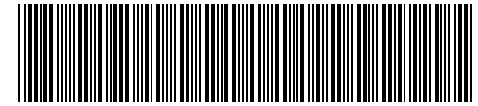
DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416258	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	13.193.480	38.648.269	-	-	-	51.841.749		
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	20.113.773	-	-	-	20.113.773		
6822	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	20.113.773	-	-	-	20.113.773		
6822.ADE	Akreditasi Lembaga (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	394.432	-	-	-	394.432	02 . 07	
01	RM	-	394.432	-	-	-	394.432	128@	
6822.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	188.610	-	-	-	188.610	02 . 07	
01	RM	-	188.610	-	-	-	188.610	128@	
6822.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	870.692	-	-	-	870.692	02 . 07	
01	RM	-	870.692	-	-	-	870.692	128@	
6822.BGD	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	435.240	-	-	-	435.240	02 . 07	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 PNB		-	435.240	-	-	-	435.240	128@	
6822.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	10.242.610	-	-	-	10.242.610	02 . 07	
01 RM		-	8.525.041	-	-	-	8.525.041	128@	
04 PNB		-	1.717.569	-	-	-	1.717.569	128@	
6822.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	7.982.189	-	-	-	7.982.189	02 . 07	
01 RM		-	7.982.189	-	-	-	7.982.189	128@	
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	13.193.480	18.534.496	-	-	-	31.727.976		
4399	Tata Kelola SDM	-	3.979.995	-	-	-	3.979.995		
4399.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	3.979.995	-	-	-	3.979.995	02 . 07	
01 RM		-	3.979.995	-	-	-	3.979.995	128@	
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan	13.193.480	14.554.501	-	-	-	27.747.981		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6798.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	107.500	-	-	-	107.500	02 . 07	
01	RM	-	107.500	-	-	-	107.500	128@	
6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	13.193.480	13.652.502	-	-	-	26.845.982	02 . 07	
01	RM	13.193.480	13.652.502	-	-	-	26.845.982	128@	
6798.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	486.641	-	-	-	486.641	02 . 07	
01	RM	-	486.641	-	-	-	486.641	128@	
6798.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (02.07 JAWA BARAT / KAB. CIANJUR)	-	307.858	-	-	-	307.858	02 . 07	
01	RM	-	307.858	-	-	-	307.858	128@	
JUMLAH		13.193.480	38.648.269	-	-	-	51.841.749		

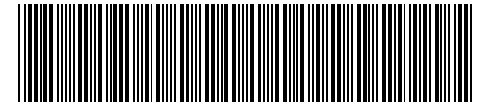
Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Provinsi : (02) JAWA BARAT
Kode>Nama Satker : (416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	416258	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO													
		RENCANA PENARIKAN DANA	685.194	1.290.905	1.914.412	1.865.076	1.572.668	2.423.744	2.468.223	2.486.576	2.142.949	2.098.835	3.078.574	29.814.595	51.841.749
		BELANJA PEGAWAI	594.108	933.397	1.779.121	978.068	989.049	1.834.293	1.018.128	1.024.175	1.008.405	1.015.682	800.301	1.218.753	13.193.480
		BELANJA BARANG	91.085	357.508	135.291	887.008	583.619	589.451	1.450.095	1.462.401	1.134.543	1.083.153	2.278.273	28.595.842	38.648.269
024.12.DL.6822		Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	73.282	1.171	371.619	1.500	46.801	461.931	516.374	167.869	92.179	411.846	17.969.201	20.113.773
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	73.282	1.171	371.619	1.500	46.801	461.931	516.374	167.869	92.179	411.846	17.969.201	20.113.773
024.12.WA.4399		Tata Kelola SDM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.979.995	3.979.995
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.979.995	3.979.995
024.12.WA.6798		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan	685.194	1.217.623	1.913.241	1.493.457	1.571.168	2.376.943	2.006.292	1.970.202	1.975.079	2.006.656	2.666.728	7.865.399	27.747.981
		51 BELANJA PEGAWAI	594.108	933.397	1.779.121	978.068	989.049	1.834.293	1.018.128	1.024.175	1.008.405	1.015.682	800.301	1.218.753	13.193.480
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	91.085	284.226	134.120	515.389	582.119	542.650	988.164	946.027	966.674	990.974	1.866.427	6.646.645	14.554.501
		PERKIRAAN PENERIMAAN	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.143	197.152	2.365.725
		- PNBP (425151)	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.102	32.103	385.225
		- PNBP (425421)	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.041	165.049	1.980.500

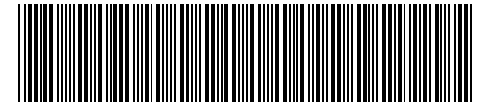
Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
IV A. B L O K I R**



DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [416258] BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
416258	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.460
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 27.659.210		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	52 Belanja Barang Rp. 27.659.210	6822.BDC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
6822	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan		521211 Belanja Bahan(RM)
6822.ADE	Akreditasi Lembaga		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 97.436
	521211 Belanja Bahan(RM)		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 900		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.600
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.000		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.300
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.200		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 266.164
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 249.349		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.850
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 112.600	6822.BGD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Kesehatan
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP)
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 316.066
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 112.600		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
IV A. B L O K I R**



DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [416258] BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6822.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan		
521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 1.133.456	522151	Belanja Jasa Profesi(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 381.800
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521211	Belanja Bahan(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 917.429	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 4.985.038
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 136.700	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 320.740
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 3.000	6822.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 1.611.936
522141	Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 231.900	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 159.900
522141	Belanja Sewa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 94.600	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522141	Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 298.490
522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 1.538.400	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Rp. 1.650.000
		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
IV A. B L O K I R**



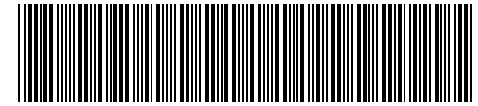
DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [416258] BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
024.12.WA 4399 4399.EBC	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6798 6798.CCL 6798.EBA	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.216.613 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.250 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.432 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Program Dukungan Manajemen Tata Kelola SDM		523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 52.818 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Layanan Manajemen SDM Internal		Layanan Dukungan Manajemen Internal
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.217.515 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 203.721 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 81.800 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.300 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 692.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 165.839 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 988.680		521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 169.201 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
IV A. B L O K I R**



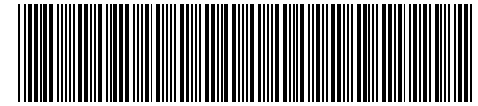
DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [416258] BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.065.556 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.570 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 60.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522111	Belanja Langganan Listrik(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 546.248 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522112	Belanja Langganan Telepon(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.200 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 219.937 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 427.278 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.600 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522191	Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 723.981 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6798.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.212 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan(RM)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
IV A. B L O K I R**



DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [416258] BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6798.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.104 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.300 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.500 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 157.327 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.200 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 23.550 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 331.094 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.280 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Layanan Manajemen Kinerja Internal 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 990 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.800 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		

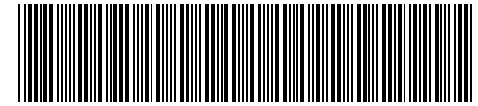
Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.12.2.416258/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:3023-5006-6620-0085

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Provinsi : [02] JAWA BARAT
Kode dan Nama Satker : [416258] BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara